

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Magelang, 2024, KOTA MAGELANG DALAM ANGKA Magelang Municipality in Figures 2024, Badan Pusat Statistik Kota Magelang, Kota Magelang.
- Badan Standardisasi Nasional, 2003, Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Keraf, Sonny, 2013, “Fritjof Capra Tentang Melek Ekologi Menuju Masyarakat Berkelanjutan”, Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara, Vol. 12, No. 1.
- Harsono, 2013, Hukum Agraria Indonesia “Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya”, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Leks, Eddy Marek, 2015, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perumahan Rakyat, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram.
- Pertiwi, Nurlita, 2017, “Implementasi Sustainable Development di Indonesia”, Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2013, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sampara, Said dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Total Media, Yogyakarta.
- Santoso, Urip, 2010, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung 96 _____, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Suparno, 2006, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Andi Offset, Yogyakarta.
- Wantu, Fence M., 2007, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.13, Yogyakarta, Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada.
- Vorry Rahmad, Kurnia Warman, dan Jean Elvardi, September 2023, “Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Tanah Datar)”, Unes Law Review 6, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Optimalisasi Prasarana Dan Sarana Umum Perumahan Oleh Pemerintah Kota Magelang Dalam Rangka Mewujudkan Kemanfaatan Bersama (Studi Kasus Optimalisasi Prasarana dan Sarana Umum di Perumahan Barito Kota Magelang)

Dwi prihatmoko, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624). 97

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M Tahun 2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persiapan, Pelaksanaan, dan Pasca Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Internet:

Emba, Dewi Maharani, 2013, Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/38947-Full_Text.pdf. diakses pada tanggal 26 September 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/rumah>, diakses pada 6 November 2024.

Vorry, Rahmad, "Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Tanah



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Optimalisasi Prasarana Dan Sarana Umum Perumahan Oleh Pemerintah Kota Magelang Dalam Rangka Mewujudkan Kemanfaatan Bersama (Studi Kasus Optimalisasi Prasarana dan Sarana Umum di Perumahan Barito Kota Magelang)

Dwi prihatmoko, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si.

Datar) <http://sekolahmandala.id/213564/1/COVER%20DAN%20ABST>

RAK%20VORRY.pdf., diakses pada tanggal 27 September 2024.

Yuanar, Riesma, “Pelaksanaan Kewajiban Pengembang Perumahan dalam Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial kepada Pemerintah Kota Semarang, <https://lib.unnes.ac.id/48603/>. diakses pada tanggal 27 September 2024. Prasetyowati, Dhymes, 2021, “Studi Pelaksanaan Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan di Kecamatan 98 Wungu Kabupaten Madiun Kepada Pemerintah Kabupaten Madiun”, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021. diakses pada tanggal 28 Mei 2025.